

Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara Jakarta

Herinto Sidik Iriansyah^{a,1}, Saryono^{b,2}

^{a,b}STKIP Kusuma Negara, Jakarta, Indonesia

¹herinto_sidik@stkipkusumanegara.ac.id; ²saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id

^{*}herinto_sidik@stkipkusumanegara.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 22 Maret 2026

Direvisi: 15 April 2026

Disetujui: 29 Mei 2026

Tersedia Daring: 30 Juni 2026

Kata Kunci:

Manajemen Pendidikan;

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Perguruan Tinggi;

POAC;

STKIP Kusuma Negara

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berkarakter. Namun, keberhasilan penyelenggaraannya tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi pembelajaran, tetapi juga oleh efektivitas fungsi manajemen yang mengintegrasikan aspek *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (POAC). Kajian mengenai implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan secara komprehensif pada berbagai program studi di perguruan tinggi masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fungsi POAC dalam penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan pada enam program studi di STKIP Kusuma Negara Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 42 orang yang terdiri atas satu Wakil Ketua I Bidang Akademik, enam Ketua Program Studi, lima dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan, dan tiga puluh mahasiswa dari enam program studi. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi POAC telah berlangsung secara terpadu. Fungsi *planning* diwujudkan melalui penyusunan RPS, penetapan capaian pembelajaran, penyediaan bahan ajar, dan pemanfaatan media pembelajaran yang adaptif. Fungsi *organizing* dilaksanakan melalui penugasan dosen sesuai kompetensi, pengaturan kelas, penyusunan jadwal, dan koordinasi antarsatuan akademik. Fungsi *actuating* tercermin dalam penerapan pembelajaran aktif, pemanfaatan teknologi digital, serta internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Sementara itu, fungsi *controlling* dilaksanakan melalui monitoring, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi fungsi POAC mampu mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan secara sistematis, adaptif, dan berkelanjutan serta memperkuat integrasi antara tata kelola akademik dengan pengembangan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa. Temuan ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model manajemen Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, khususnya pada institusi kependidikan yang menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan secara lintas program studi.

ABSTRACT

Keywords:
Civic Education;
College;
Education Management;
POAC;
STKIP Kusuma Negara

Citizenship Education in higher education plays a strategic role in developing intelligent, democratic, and responsible citizens. However, the effectiveness of its implementation depends not only on the quality of instructional content but also on the effectiveness of management functions that integrate planning, organizing, actuating, and controlling (POAC). Studies examining the comprehensive implementation of management functions in Citizenship Education across multiple academic programs remain limited. This study aims to analyze the implementation of the POAC management functions in Citizenship Education across six study programs at STKIP Kusuma Negara, Jakarta. A qualitative approach with a case study design was employed. The participants consisted of 42 informants, including one Vice Chair for Academic Affairs, six Heads of Study Programs, five Citizenship Education lecturers, and thirty students representing six study programs. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, encompassing data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The trustworthiness of the findings was ensured through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The findings indicate that the implementation of the POAC management functions has been carried out in an integrated manner. The planning function was reflected in the preparation of course learning plans, the formulation of learning outcomes, the provision of instructional materials, and the use of adaptive learning media. The organizing function was implemented through the assignment of lecturers based on their expertise, class allocation, scheduling, and coordination among academic units. The actuating function was demonstrated through active learning strategies, the integration of digital technology, and the internalization of citizenship values. Meanwhile, the controlling function was carried out through monitoring, evaluation, academic supervision, and continuous follow-up aimed at improving instructional quality. This study concludes that the implementation of the POAC management functions supports the systematic, adaptive, and sustainable delivery of Citizenship Education while strengthening the integration between academic governance and the development of students' civic competencies. These findings provide an empirical contribution to the advancement of Citizenship Education management in higher education, particularly in teacher education institutions that implement Citizenship Education across multiple study programs.

©2026, Herinto Sidik Iriansyah, Saryono

This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai bagian dari Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tentang negara, konstitusi, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menjadi wahana pembentukan karakter dan penguatan identitas kebangsaan mahasiswa. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic*

disposition sehingga mampu menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Nurwardani et al., 2016). Dengan demikian, PKn tidak hanya dipahami sebagai mata kuliah yang berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan mahasiswa. Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya tidak hanya mengembangkan dimensi pengetahuan kewargaan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Pendidikan moral merupakan proses terencana untuk mengembangkan sikap, perilaku, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral sehingga peserta didik mampu hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, pembentukan *civic disposition* tidak dapat dipisahkan dari penguatan nilai moral melalui proses pendidikan yang dikelola secara sistematis (Fatmawati et al., 2024).

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan semakin meningkat pada era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, keterbukaan akses pengetahuan, serta perubahan pola interaksi sosial dan politik masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi digital memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi, namun kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, polarisasi sosial, intoleransi, serta menurunnya kualitas partisipasi kewargaan. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk mampu membekali mahasiswa tidak hanya dengan pengetahuan kewargaan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, keterampilan berpartisipasi, serta sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hamidah (2019), menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan globalisasi melalui pembentukan kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di sisi lain, perkembangan teknologi pembelajaran juga mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi agar proses pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa masa kini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh substansi materi, tetapi juga oleh bagaimana proses pembelajaran dirancang dan dikelola sehingga mampu membentuk partisipasi demokratis peserta didik. Kajian terhadap *Citizenship Education Longitudinal Study (CELS)* menunjukkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan mampu meningkatkan *civic engagement*, kesadaran demokratis, serta tanggung jawab warga negara. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan proses pembelajaran, sehingga implementasi fungsi manajemen menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Tria et al., 2025).

Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi pembelajaran atau kompetensi dosen, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana proses pembelajaran tersebut dikelola secara sistematis. Dalam perspektif manajemen pendidikan, pembelajaran merupakan suatu sistem yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, implementasi fungsi manajemen menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan. Iriansyah & Saryono (2026) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh aktivitas mengajar di kelas, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola seluruh komponen pembelajaran secara terpadu.

Kerangka teoritis yang banyak digunakan dalam kajian manajemen pendidikan adalah teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu *Planning, Organizing,*

Actuating, dan *Controlling* (POAC). Fungsi *planning* berkaitan dengan penyusunan tujuan, perencanaan program, serta penyediaan perangkat pembelajaran. Fungsi *organizing* berkaitan dengan pengaturan sumber daya, pembagian tugas, dan koordinasi antarunit. Fungsi *actuating* menekankan pada pelaksanaan kegiatan yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya agar tujuan organisasi tercapai. Sementara itu, fungsi *controlling* berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan membentuk siklus manajemen yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif (Terry, 1953). Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, implementasi fungsi POAC menjadi penting karena pembelajaran PKn tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa, tetapi juga membentuk keterampilan dan karakter kewargaan yang memerlukan pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan kompetensi kewargaan mahasiswa. Widiatmaka & Purwoko (2021), menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membangun karakter toleransi mahasiswa melalui strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nuphanudin et al. (2024), menunjukkan bahwa integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan manajemen peserta didik mampu membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Selain itu, penelitian Anggrainy et al. (2023), menemukan bahwa manajemen pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi telah menerapkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pengelolaan materi pembelajaran, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada satu institusi dan satu program studi sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi fungsi manajemen PKn pada konteks yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunisa & Ahmadi (2025), juga menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama pada beberapa program studi telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan dosen dan pimpinan program studi sebagai aktor utama dalam pengelolaan pembelajaran. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menekankan pada integrasi moderasi beragama dan belum secara khusus menggunakan fungsi manajemen POAC sebagai kerangka analisis utama. Di sisi lain, penelitian mengenai implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi umumnya masih menitikberatkan pada aspek substansi pembelajaran, pembentukan karakter, atau strategi pembelajaran, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi fungsi manajemen dalam penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada satu program studi atau satu institusi sehingga belum menggambarkan implementasi fungsi manajemen secara lintas program studi dalam satu perguruan tinggi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi masih didominasi oleh penelitian yang berfokus pada aspek pembelajaran dan pembentukan karakter, sementara penggunaan fungsi manajemen sebagai perspektif analisis masih terbatas. Kedua, penelitian mengenai manajemen Pendidikan Kewarganegaraan umumnya dilakukan pada satu program studi atau satu institusi sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi fungsi manajemen secara lintas program studi. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kerangka *Planning, Organizing,*

Actuating, dan *Controlling* (POAC) pada enam program studi dalam satu perguruan tinggi kependidikan, khususnya STKIP Kusuma Negara.

STKIP Kusuma Negara merupakan perguruan tinggi kependidikan di Jakarta memiliki karakteristik yang menarik untuk dikaji dalam konteks penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan. Perguruan tinggi ini menyelenggarakan enam program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Pendidikan Olahraga. Seluruh program studi tersebut memiliki kewajiban menyelenggarakan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan kurikulum pendidikan tinggi. Keberagaman karakteristik keilmuan mahasiswa pada masing-masing program studi menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan, karena proses pembelajaran tidak hanya dituntut untuk memenuhi capaian pembelajaran yang bersifat nasional, tetapi juga harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan konteks akademik mahasiswa pada setiap program studi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bergantung pada kompetensi dosen, tetapi juga memerlukan implementasi fungsi manajemen yang efektif agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan kompetensi kewargaan mahasiswa

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen POAC sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kedua, penelitian dilakukan secara lintas enam program studi, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Olahraga sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi fungsi manajemen PKn. Ketiga, penelitian ini dilakukan pada perguruan tinggi kependidikan yang memiliki karakteristik khusus karena seluruh program studinya bergerak pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* pada enam program studi di STKIP Kusuma Negara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* pada enam program studi di STKIP Kusuma Negara. Penelitian dilaksanakan di STKIP Kusuma Negara Jakarta yang memiliki enam program studi, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Pendidikan Olahraga. Subjek penelitian berjumlah 42 orang yang terdiri atas 1 Wakil Ketua I Bidang Akademik, 6 Ketua Program Studi, 5 dosen pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan 30 mahasiswa yang berasal dari enam program studi dengan masing-masing program studi diwakili oleh lima mahasiswa. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan.

Objek penelitian adalah implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup empat fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Fungsi *planning* meliputi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS),

capaian pembelajaran, bahan ajar, serta metode pembelajaran. Fungsi *organizing* mencakup penugasan dosen, pengaturan jadwal, pembagian kelas, dan koordinasi antarprogram studi. Fungsi *actuating* berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, penggunaan metode dan media pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Adapun fungsi *controlling* meliputi monitoring perkuliahan, evaluasi pembelajaran, supervisi akademik, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas akademik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, jadwal perkuliahan, serta dokumen evaluasi pembelajaran. Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan pada enam program studi di STKIP Kusuma Negara.

Tabel 1. Operasionalisasi Fokus Penelitian

Fokus	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Planning	RPS, CPL, bahan ajar, metode	Ketua Prodi, Dosen, Dokumen	Wawancara, Dokumentasi
Organizing	Dosen, jadwal, koordinasi	Waket I, Ketua Prodi	Wawancara, Dokumentasi
Actuating	Proses pembelajaran, media, teknologi	Dosen, Mahasiswa	Observasi, Wawancara
Controlling	Monitoring, evaluasi, supervisi	Waket I, Ketua Prodi, Dosen	Wawancara, Dokumentasi

Sumber: Peneliti (2026)

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Fungsi *Planning* Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi *planning* Pendidikan Kewarganegaraan pada enam program studi di STKIP Kusuma Negara telah dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penetapan capaian pembelajaran, penyediaan bahan ajar, serta pemilihan media pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi diketahui bahwa penyusunan RPS mengacu pada kurikulum perguruan tinggi dan kebijakan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). RPS yang digunakan memiliki struktur yang relatif sama pada seluruh program studi, namun dosen diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik mahasiswa. Capaian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

diarahkan pada penguasaan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Meskipun capaian pembelajaran yang ditetapkan bersifat umum, implementasinya menunjukkan adanya penyesuaian pada masing-masing program studi. Mahasiswa Pendidikan Matematika dan Pendidikan Bahasa Inggris lebih diarahkan pada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, sedangkan mahasiswa PG-PAUD dan PGSD lebih banyak memperoleh penguatan pada aspek karakter dan keteladanan. Sementara itu, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memperoleh pendalaman materi yang lebih komprehensif karena relevan dengan bidang keilmuan mereka. Bahan ajar yang digunakan berupa buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, modul digital, artikel ilmiah, serta bahan presentasi yang disusun oleh dosen pengampu. Selain itu, dosen juga memanfaatkan isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat sebagai bahan diskusi dalam pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan mahasiswa diketahui bahwa penggunaan bahan ajar yang kontekstual membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu mahasiswa memahami relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dengan kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran yang digunakan cukup beragam, antara lain LCD proyektor, video pembelajaran, *Google Classroom*, *Learning Management System (LMS)*, dan aplikasi konferensi daring. Penggunaan media digital semakin meningkat terutama untuk mendukung penyampaian materi, pemberian tugas, serta komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *planning* tidak hanya berorientasi pada penyusunan perangkat pembelajaran, tetapi juga pada kesiapan sumber belajar dan media yang mendukung proses pembelajaran.

Tabel 2. Implementasi Fungsi *Planning* Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Indikator	Temuan Penelitian	Informan Dominan	Analisis Singkat
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Seluruh program studi menggunakan RPS yang mengacu pada kurikulum institusi dan kebijakan MKWU Pendidikan Kewarganegaraan.	Wakil Ketua I, Ketua Prodi, Dosen	Terdapat standarisasi perangkat pembelajaran sehingga memudahkan pengelolaan PKN lintas program studi.
Capaian Pembelajaran	Capaian pembelajaran diarahkan pada penguasaan <i>civic knowledge</i> , <i>civic skills</i> , dan <i>civic disposition</i> .	Ketua Prodi, Dosen	Capaian pembelajaran bersifat umum, tetapi implementasinya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing program studi.
Bahan Ajar	Bahan ajar terdiri atas buku ajar PKN, modul digital, artikel ilmiah, dan isu-isu aktual kewarganegaraan.	Dosen, Mahasiswa	Bahan ajar yang kontekstual membantu mahasiswa memahami keterkaitan PKN dengan kehidupan sehari-hari.
Media Pembelajaran	Dosen menggunakan LCD, video pembelajaran, LMS, dan <i>Google Classroom</i> .	Dosen, Mahasiswa	Pemanfaatan media digital mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel.

Sumber: Hasil penelitian diolah peneliti (2026)

Temuan tersebut sesuai dengan teori POAC yang dikemukakan Terry yang menempatkan planning sebagai fungsi dasar manajemen yang menentukan tujuan, strategi, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi (Terry, 1953). Dalam konteks pendidikan, perencanaan bukan sekadar penyusunan dokumen pembelajaran, tetapi merupakan proses sistematis untuk menentukan arah pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan RPS, capaian pembelajaran, bahan ajar, dan media pembelajaran merupakan indikator penting dalam implementasi fungsi planning. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggrainy et al. (2023), yang menemukan bahwa manajemen pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi diawali dengan penyusunan RPS, pengorganisasian materi, serta penetapan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan Masnun & Pratama (2020), yang menyatakan bahwa implementasi kurikulum MKWU Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi harus memperhatikan sinkronisasi antara kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan institusi. Mereka menemukan adanya disharmoni dalam pengaturan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi pembelajaran di perguruan tinggi. Lebih lanjut, Iriansyah & Saryono (2026), menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan tidak lagi dipahami sebagai instrumen administratif semata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis yang menentukan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan, dan sistem penjaminan mutu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi planning pada Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan pada penguatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pentingnya perencanaan sebagai fondasi penyelenggaraan pembelajaran. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena dilakukan pada enam program studi yang memiliki karakteristik mahasiswa yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan dosen perlu melakukan penyesuaian strategi pembelajaran tanpa mengubah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa fungsi *planning* dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu dipahami sebagai proses yang bersifat adaptif dan kontekstual. Sementara itu, implikasi praktisnya adalah perlunya pengembangan RPS, bahan ajar, dan media pembelajaran yang lebih fleksibel agar mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dari berbagai program studi. Dengan demikian, implementasi fungsi *planning* Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP Kusuma Negara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori POAC. Namun, perencanaan pembelajaran perlu terus dikembangkan agar lebih adaptif terhadap karakteristik mahasiswa dan perkembangan pendidikan tinggi di era digital.

Implementasi Fungsi *Organizing* Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Implementasi fungsi *organizing* dilakukan melalui pengaturan dosen pengampu, pembagian kelas, penyusunan jadwal, dan koordinasi akademik. Berdasarkan hasil penelitian, penugasan dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh pimpinan institusi dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman mengajar dosen. Sebagian besar dosen pengampu memiliki latar belakang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga dinilai memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola pembelajaran. Pembagian kelas dilakukan berdasarkan jumlah mahasiswa pada masing-masing program studi. Program studi dengan jumlah mahasiswa yang lebih besar memiliki lebih dari satu kelas, sedangkan program studi dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit digabungkan dalam satu kelas sesuai ketentuan akademik yang berlaku. Hasil observasi

menunjukkan bahwa pembagian kelas yang proporsional memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengelola pembelajaran secara lebih efektif dan memungkinkan interaksi yang lebih intensif dengan mahasiswa. Jadwal perkuliahan disusun setiap awal semester oleh bagian akademik dengan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan dosen pengampu. Secara umum, jadwal perkuliahan berjalan dengan baik, meskipun pada beberapa kesempatan ditemukan kendala berupa benturan jadwal dosen atau penggunaan ruang kelas. Kendala tersebut biasanya diselesaikan melalui koordinasi antara program studi dan bagian akademik. Koordinasi menjadi salah satu aspek penting dalam fungsi *organizing*. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dilakukan melalui rapat akademik, komunikasi informal, serta evaluasi rutin pada setiap akhir semester. Koordinasi yang baik antara Wakil Ketua I Bidang Akademik, Ketua Program Studi, dan dosen pengampu menjadi faktor yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh program studi.

Tabel 3. Implementasi Fungsi *Organizing* Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Indikator	Temuan Penelitian	Informan Dominan	Analisis Singkat
Dosen Pengampu	Penugasan dosen dilakukan berdasarkan kompetensi dan latar belakang keilmuan PKN.	Wakil Ketua I, Ketua Prodi	Kompetensi dosen menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas pembelajaran PKN.
Pembagian Kelas	Pembagian kelas dilakukan berdasarkan jumlah mahasiswa pada masing-masing program studi.	Ketua Prodi	Pembagian kelas yang proporsional meningkatkan efektivitas pembelajaran dan interaksi dosen-mahasiswa.
Jadwal Perkuliahan	Jadwal perkuliahan disusun oleh bagian akademik dan dikoordinasikan dengan program studi.	Wakil Ketua I, Ketua Prodi	Jadwal yang terstruktur mendukung kelancaran penyelenggaraan PKN.
Koordinasi	Koordinasi dilakukan melalui rapat akademik dan komunikasi rutin antara pimpinan dan dosen.	Wakil Ketua I, Ketua Prodi, Dosen	Koordinasi yang baik menjadi faktor pendukung implementasi PKN lintas program studi.

Sumber: Hasil penelitian diolah peneliti (2026)

Temuan tersebut sesuai dengan teori Terry yang menyatakan bahwa *organizing* merupakan proses mengelompokkan kegiatan, membagi tugas, menetapkan hubungan kerja, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Terry, 1953). Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pengorganisasian tidak hanya menyangkut pembagian tugas mengajar, tetapi juga mencakup pengelolaan mahasiswa, pengaturan jadwal, dan koordinasi antarunit akademik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Khoirunisa & Ahmadi (2025), yang menemukan bahwa keberhasilan manajemen pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara pimpinan program studi dan

dosen pengampu. Mereka menegaskan bahwa komunikasi yang baik menjadi faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan pembelajaran yang efektif.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nuphanudin et al. (2024), yang menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi harus terintegrasi dengan sistem manajemen mahasiswa. Integrasi tersebut diperlukan untuk membangun warga negara yang memiliki kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada satu atau dua program studi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada enam program studi sekaligus. Konsekuensinya, proses pengorganisasian menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan perbedaan jumlah mahasiswa, karakteristik program studi, dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa fungsi *organizing* dalam Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi juga kemampuan membangun koordinasi dan kolaborasi lintas program studi. Adapun implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan sistem koordinasi akademik yang lebih terintegrasi sehingga penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan dapat berjalan secara lebih efektif. Dengan demikian, implementasi fungsi *organizing* Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP Kusuma Negara telah berjalan dengan baik melalui pengelolaan sumber daya dan koordinasi yang memadai. Namun, kompleksitas penyelenggaraan lintas program studi memerlukan sistem koordinasi yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Implementasi Fungsi *Actuating* Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi *actuating* merupakan aspek yang paling terlihat dalam penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan karena berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS yang telah disusun sebelumnya. Dosen tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena sosial, politik, dan kebangsaan yang sedang berkembang sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Metode pembelajaran yang digunakan cukup beragam. Selain metode ceramah, dosen juga menerapkan diskusi kelompok, studi kasus, *problem based learning*, presentasi, dan debat akademik. Mahasiswa menyatakan bahwa penggunaan metode yang variatif membuat mereka lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mendorong mereka untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan kewarganegaraan. Dalam aspek teknologi pembelajaran, dosen memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Penggunaan *Google Classroom*, LMS, video pembelajaran, dan aplikasi konferensi daring membantu dosen dalam menyampaikan materi, memberikan tugas, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi juga mempermudah mahasiswa mengakses sumber belajar secara mandiri. Internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dilakukan melalui berbagai aktivitas pembelajaran, seperti diskusi mengenai nilai-nilai Pancasila, kajian isu demokrasi, penguatan sikap toleransi, serta refleksi terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa mengakui bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep kewargaan, tetapi juga membentuk sikap yang lebih toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 4. Implementasi Fungsi *Actuating* Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Indikator	Temuan Penelitian	Informan Dominan	Analisis Singkat
Proses	Pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS	Dosen,	Pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan

Pembelajaran	dan dikaitkan dengan isu-isu aktual kewarganegaraan.	Mahasiswa	relevan dengan kehidupan mahasiswa.
Metode Pembelajaran	Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, problem based learning, presentasi, dan debat akademik.	Dosen, Mahasiswa	Variasi metode pembelajaran meningkatkan partisipasi dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
Teknologi Pembelajaran	Dosen memanfaatkan LMS, Google Classroom, video pembelajaran, dan media digital lainnya.	Dosen, Mahasiswa	Teknologi pembelajaran memperluas akses mahasiswa terhadap sumber belajar.
Internalisasi Nilai Kewarganegaraan	Nilai Pancasila, demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab warga negara diintegrasikan dalam pembelajaran.	Dosen, Mahasiswa	Internalisasi nilai dilakukan secara berkelanjutan melalui materi, diskusi, dan keteladanan dosen.

Sumber: Hasil penelitian diolah peneliti (2026)

Temuan tersebut sesuai dengan teori Terry yang menyatakan bahwa *actuating* merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai (Terry, 1953). Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, fungsi *actuating* tidak hanya bermakna pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga proses internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan pengembangan kompetensi kewargaan mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widayanti et al. (2024), yang menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis *e-learning* telah menjadi strategi penting dalam pendidikan tinggi. Pemanfaatan LMS, *Google Classroom*, dan media digital memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih fleksibel dan meningkatkan partisipasi mahasiswa. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Widiatmaka & Purwoko (2021), yang menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun karakter toleransi mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa peran dosen sangat penting dalam mengembangkan karakter mahasiswa melalui strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selain itu, Hardiyanto et al. (2025), menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki kontribusi besar dalam mempromosikan moderasi beragama melalui pendekatan kurikulum integratif, metode pembelajaran aktif, dan penguatan nilai toleransi. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Saryono et al. (2024), yang menegaskan bahwa pendidikan karakter bangsa harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan karena karakter warga negara merupakan fondasi kehidupan demokratis. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada akhirnya diarahkan agar mahasiswa memahami bahwa negara tidak hanya dipandang sebagai institusi politik, tetapi sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi hak-hak warga negara. Pemahaman tersebut penting karena keberhasilan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang memahami konsep negara secara normatif, tetapi juga memiliki kesadaran kritis terhadap fungsi perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan yang harus dijalankan negara (Iriansyah & Saryono, 2025).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pentingnya pembelajaran aktif dan internalisasi nilai kewarganegaraan. Perbedaanannya, penelitian ini

menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran menjadi unsur yang semakin penting dalam implementasi fungsi *actuating* di perguruan tinggi. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa fungsi *actuating* perlu dipahami sebagai proses pedagogis yang interaktif, partisipatif, dan berbasis teknologi. Implikasi praktisnya adalah perlunya peningkatan kompetensi dosen dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, implementasi fungsi *actuating* Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP Kusuma Negara menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi kewargaan melalui pembelajaran aktif dan berbasis teknologi.

Implementasi Fungsi *Controlling* Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara.

Implementasi fungsi *controlling* dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut. Monitoring dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan jadwal dan RPS yang telah ditetapkan. Monitoring juga dilakukan melalui pemeriksaan administrasi pembelajaran, kehadiran dosen, dan pelaporan aktivitas perkuliahan. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas individu, tugas kelompok, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Selain menilai aspek pengetahuan, dosen juga melakukan penilaian terhadap partisipasi mahasiswa, kemampuan berpikir kritis, serta sikap yang ditunjukkan selama proses pembelajaran. Supervisi akademik dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran dan memberikan masukan kepada dosen. Hasil supervisi menunjukkan bahwa secara umum pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran dan pengembangan bahan ajar berbasis digital. Tindak lanjut dilakukan melalui perbaikan RPS, pengembangan bahan ajar, peningkatan kompetensi dosen, serta penguatan koordinasi antarprogram studi. Dengan demikian, fungsi *controlling* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan secara berkelanjutan.

Tabel 5. Implementasi Fungsi *Controlling* Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara

Indikator	Temuan Penelitian	Informan Dominan	Analisis Singkat
Monitoring	Monitoring dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Program Studi melalui pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan administrasi pembelajaran.	Wakil Ketua I, Ketua Prodi	Monitoring memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan RPS dan jadwal yang telah ditetapkan.
Evaluasi	Evaluasi dilakukan melalui tugas, UTS, UAS, dan penilaian partisipasi mahasiswa.	Dosen, Mahasiswa	Evaluasi tidak hanya menilai aspek pengetahuan, tetapi juga partisipasi dan sikap mahasiswa.
Supervisi	Supervisi akademik dilakukan secara berkala	Wakil Ketua I,	Supervisi berfungsi sebagai sarana

	untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Ketua Prodi	pembinaan dan peningkatan mutu pembelajaran.
Tindak Lanjut	Dilakukan perbaikan RPS, pengembangan bahan ajar, peningkatan kompetensi dosen, dan penyempurnaan metode pembelajaran.	Wakil Ketua I, Ketua Prodi, Dosen	Tindak lanjut menunjukkan adanya komitmen terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Sumber: Hasil penelitian diolah peneliti (2026)

Temuan tersebut sesuai dengan teori Terry yang menyatakan bahwa *controlling* merupakan proses mengukur, membandingkan, dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Terry, 1953). Dalam konteks pendidikan, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan mutu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggrainy et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pengawasan pembelajaran dilakukan melalui observasi lapangan oleh pimpinan program studi untuk memastikan kesesuaian antara RPS dan pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara formatif maupun sumatif sebagai bagian dari pengendalian mutu pembelajaran. Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh Iriansyah & Saryono (2026), yang menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu internal dan pengelolaan berbasis data menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Pengawasan tidak lagi dipahami sebagai aktivitas administratif semata, tetapi sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu (*continuous quality improvement*). Selain itu, penelitian Saryono, et al. (2024), menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter dan kewarganegaraan memerlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Artinya, pengawasan pembelajaran juga perlu memperhatikan lingkungan sosial yang memengaruhi pembentukan karakter mahasiswa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan monitoring dan evaluasi sebagai instrumen pengendalian mutu. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa fungsi *controlling* dalam Pendidikan Kewarganegaraan harus dipahami sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Adapun implikasi praktisnya adalah perlunya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi agar pengawasan pembelajaran menjadi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, implementasi fungsi *controlling* Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP Kusuma Negara telah berjalan dengan baik melalui monitoring, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut yang berorientasi pada peningkatan mutu. Fungsi ini menjadi penutup sekaligus penghubung bagi siklus manajemen POAC sehingga penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan dapat berlangsung secara berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan warga negara yang berkarakter.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori POAC dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dengan menunjukkan bahwa fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap karakteristik mahasiswa dan perkembangan teknologi. Secara praktis, penelitian ini memberikan model implementasi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan lintas enam program studi yang dapat

menjadi rujukan bagi perguruan tinggi kependidikan dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan pada enam program studi di STKIP Kusuma Negara telah dilaksanakan melalui empat fungsi utama manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Pada aspek *planning*, penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan telah didukung oleh perencanaan pembelajaran yang sistematis melalui penyusunan RPS, penetapan capaian pembelajaran, penyediaan bahan ajar, dan penggunaan media pembelajaran yang relevan. Pada aspek *organizing*, pengelolaan sumber daya akademik dilakukan melalui penugasan dosen sesuai kompetensi, pembagian kelas yang proporsional, penyusunan jadwal, dan koordinasi yang baik antarunit akademik. Selanjutnya, pada aspek *actuating*, proses pembelajaran telah dilaksanakan secara aktif dengan memanfaatkan berbagai metode dan teknologi pembelajaran serta mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sementara itu, pada aspek *controlling*, monitoring, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut telah dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga bersifat adaptif terhadap karakteristik mahasiswa, perkembangan teknologi pembelajaran, dan tuntutan pendidikan tinggi. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam mengintegrasikan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* secara sistematis dan berkelanjutan.

Selanjutnya peneliti merekomendasikan beberapa saran, diantaranya bagi perguruan tinggi, diperlukan penguatan kebijakan dan sistem penjaminan mutu Pendidikan Kewarganegaraan agar implementasi fungsi manajemen dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan tinggi di era digital. Selain itu, pengembangan infrastruktur pembelajaran berbasis teknologi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Bagi program studi, diperlukan peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan bahan ajar, dan pelaksanaan evaluasi agar tercipta standar mutu yang lebih baik dan berkelanjutan. Bagi dosen pengampu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran aktif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta strategi internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi kewargaan mahasiswa. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu perguruan tinggi dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perguruan tinggi yang lebih beragam dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi manajemen Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Anggrainy, D. N., Setyowati, S., & Riyanto, Y. (2023). Manajemen Pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan di Akademi Refraksi Optisi Surabaya. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(20), 795–802.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.350>

- Fatmawati, F., Fadillah, N., & Kurnia, H. (2024). Urgensi Penerapan Pendidikan Moral di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)*, 2(2), 148–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/1ndf4t58>
- Hamidah, H. (2019). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Forum Paedagogik*, 11(01), 27–39. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v11i1.1776>
- Hardiyanto, L., Saryono, S., & Romdani, R. (2025). Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(2), 155–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v5i2.2483>
- Iriansyah, H. S., & Saryono, S. (2025). Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis Kelemahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)*, 3(1), 78–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/gw383e69>
- Iriansyah, H. S., & Saryono, S. (2026). *Manajemen Sekolah (Konsep, Teori Dan Strategi)*. CV. Widina Media Utama.
- Khoirunisa, A., & Ahmadi, A. (2025). Manajemen Pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama Pada Program Studi MPI, TBG, dan PAI IAIN Palangka Raya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 64–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.34125/jmp.v10i1.371>
- Masnun, M. A., & Pratama, R. N. (2020). Disharmoni Dalam Pengaturan Kurikulum, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Supremasi*, 10(2), 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.972>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nuphanudin, N., Wardani, H. K., Gmaliel, F. X., Pattipeilohy, P., Ansori, A. S., & Kristiawan, M. (2024). Growing up citizens: mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dan manajemen peserta didik. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 12(3), 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1114700>
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Winataputra, U. S., Budimansyah, D., Sapriya, S., Winarno, W., Mulyono, E., Prawatyani, S. J., Anwar, A. A., Evawany, E., Priyautama, F., & Festanto, A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Saryono, Iriansyah, S. H., & Hardiyanto, L. (2024). Konsep Dasar Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 661–673. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1959>
- Saryono, S., Astuti, S., & Susi, S. (2024). The Role of the Tri Pusat Pendidikan in Combating Cyberbullying in Adolescents. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 15(2), 179–188. <https://doi.org/10.37640/jip.v15i2.1827>
- Terry, G. R. (1953). *Principles of management*. (p. 647 p.). R. D. Irwin.
- Triana, H., Sari, W., Andreswari, D., Irfan, A., & Hadi, I. (2025). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Dan Citizenship Education Longitudinal Study (CELS) Dalam Pembentukan Warga Negara Demokratis. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)*, 3(1), 95–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/5y1g5a32>



Widayanti, F. D., Yuniarto, E., Suryanti, E. W., & Rahayuningsih, S. (2024). Manajemen Pembelajaran Berbasis E-Learning pada Perguruan Tinggi. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 16(1), 64–82.

<https://doi.org/10.35457/konstruk.v16i1.3016>

Widiatmaka, P., & Purwoko, A. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Untuk Membangun Karakter Toleransi di Perguruan Tinggi. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 5(1), 171–186.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2021.005.02.8>